



Siapkan Strategi, DPKU Gandeng BUMD

UMBULHARJO—Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat berimbas pada fasilitasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Jogja.

Alli Annisa Karli
allih@harianjogja.com

Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PKU) Kota Jogja pun menyusun strategi agar fasilitasi tersebut bisa tetap berjalan.

Kabid Usaha Mikro Kecil (UMK) DPKU Kota Jogja, Bebasari Sitarini, menjelaskan salah satu efek dari pemangkasan anggaran itu adalah berkurangnya kegiatan perjalanan dinas. Pengurangan anggaran juga berimbas pada sisi pelatihan hingga *forum group discussion* (FGD) bagi pelaku UMKM. Sita, sapaannya, mengatakan dampak salah satunya berkaitan dengan pengadaan narasumber.

"Kegiatan ini melibatkan banyak narasumber seperti Dewan dan lembaga lain," ujar Sita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2).

Sejauh ini pemangkasan anggaran yang dilakukan mencapai 20%. Melihat dampak dari pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, Sita mengaku

▪ Sejauh ini, pemangkasan anggaran yang dilakukan DPKU Kota Jogja mencapai 20%.

▪ DPKU menggandeng BUMD dan swasta agar program pengembangan UMKM tetap berjalan.

jajarannya mencari berbagai strategi agar program pengembangan UMKM di Kota Jogja tak hanya jalan di tempat.

Salah satunya dengan menggandeng swasta, BUMD, atau lembaga lainnya. Misalnya, dengan menggelar berbagai pelatihan hingga pemberian akses permodalan bagi UMKM di Kota Jogja.

"Kami tidak diam. Kami membuat strategi agar pelaku UMKM tetap bisa berkembang, misalnya layanan produknya tetap jalan, pembiayaannya jalan, dan pemasarannya juga berjalan. Program pemerintah harus jalan. Yang pasti tetap ada kegiatan dengan bersinergi dengan lembaga lain," katanya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto menuturkan sejauh ini jajarannya baru menginventarisasi kegiatan seremonial yang biasanya digelar oleh Badan Kesbangpol. Dia mengaku belum menerima informasi terkait dengan penyusutan kegiatan FGD, seremonial, hingga *workshop* imbas dari pemangkasan anggaran.

"Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait dengan efisiensi anggaran di Bakesbangpol. Tapi, kami sudah diminta untuk inventarisasi kegiatan yang bersifat seremonial. Untuk kegiatan seperti FGD, *workshop*, maupun seminar belum ada info lebih lanjut. Kegiatan FGD di tahun sebelumnya juga tidak banyak. Pada 2024 lumayan banyak karena ada pemilu dan pilkada serentak," katanya.

Terkait dengan penanganan dan mitigasi kebencanaan, layanan informasi dan deteksi gempa tidak terdampak program pemangkasan anggaran. Sebelumnya beredar kabar efisiensi anggaran berdampak pada alat operasional utama (Aloptama) yang terancam mati karena anggaran pemeliharaan berkurang hingga 71%.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardianto Septiadhi, mengatakan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini bencana tetap berjalan, tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. "Kami pastikan layanan operasional di DIY masih berjalan dengan baik dan siap melayani masyarakat, termasuk dalam memberikan informasi terkait dengan gempa bumi," ujar Ardhi, Selasa (11/2). Ia memastikan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak berpengaruh pada layanan mitigasi bencana.